



**INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU)**
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2020

Nama Organisasi : Dinas Perhubungan
Tugas dan Kewajiban : Dinas perhubungan kabupaten mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten
Fungsi : a. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan Kabupaten
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan fungsinya
Indikator Kinerja Utama : - Persentase Menurunnya angka kecelakaan
- Indeks kelancaran lalu lintas
-1 Nilai AKIP Dinas Perhubungan
2 Persentase temuan keuangan di Dinas Perhubungan
3 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Dinas Perhubungan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Dasar Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Terwujudnya keselamatan lalu lintas angkutan darat	Persentase Menurunnya angka kecelakaan	$\frac{\text{Jumlah kecelakaan Tahun } (n-1) - \text{Jumlah Kecelakaan Tahun } (n)}{\text{Jumlah Kecelakaan } (n-1)} \times 100\%$	Polres Lima Puluh Kota dan Polres Kota Payakumbuh	DISHUB
		Persentase sarana keselamatan lalu lintas jalan di jalan yang berfungsi dengan baik	$\frac{\text{Jumlah sarana keselamatan lalu lintas jalan yang berfungsi baik/ Jumlah sarana keselamatan lalu lintas yang dibutuhkan}}{\text{Jumlah sarana keselamatan lalu lintas yang dibutuhkan}} \times 100\%$		
2	Terwujudnya Kelancaran Lalu Lintas	Indeks kelancaran lalu lintas	$\frac{\text{Volume Lalu Lintas } (V)}{\text{Kapasitas Jalan } (C)}$	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	DISHUB
		Persentase aspek penyebab kemacetan yang teratasi	$\frac{\text{Jumlah aspek penyebab kemacetan yang teratasi / Jumlah aspek penyebab kemacetan yang harus ditasi}}{\text{Jumlah aspek penyebab kemacetan yang harus ditasi}} \times 100\%$		
3	Terwujudnya Angkutan Umum dan Barang yang Laik Jalan	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan	$\frac{\text{Jumlah angkutan umum dan barang yang lain jalan / Jumlah angkutan umum dan barang yang ada}}{\text{Jumlah angkutan umum dan barang yang ada}} \times 100\%$	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	DISHUB
4	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja, Raelisasi Keuangan dan Pelayanan Publik Dinas Perhubungan	1. Nilai AKIP Dinas Perhubungan	<i>Nilai akuntabilitas kinerja dishub</i>	Inspektorat Lima Puluh Kota	DISHUB
		2. Persentase temuan keuangan di Dinas Perhubungan	$\frac{\text{Jumlah Temuan keuangan Dinas Perhubungan tahun } (n)}{\text{Jumlah Anggaran Dishub Tahun } (n)} \times 100\%$	Inspektorat Lima Puluh Kota	DISHUB
		3. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Dinas Perhubungan	<i>Nilai indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan</i>	Inspektorat Lima Puluh Kota	DISHUB

Tanjung Pati, November 2019

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lima Puluh Kota


Ir. H. ANHARMEN
NIP. 19640102 199003 1 010

